

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, INFLASI, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP UTANG PEMERINTAH PERIODE TAHUN 2019-2022

Pascawati Ida Marisa¹⁾, Diyah Santi Hariyani²⁾, Arifiansyah Saputra³⁾

¹Universitas PGRI Madiun

idapasca24@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun

diyah.santi@unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun

arifiansyah@unipma.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of tax revenue, inflation, and the rupiah exchange rate on government debt for the period 2019-2022. This research method uses descriptive quantitative. The secondary data sources that will be used in this research are the data on the total population and samples obtained from the data on the government financial statements of APBN, APBD, BPS and Website from January 2019 to April 2022. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis, classical assumptions, hypothesis testing and determination tests. The results of this study are tax revenues have a significant and positive effect on foreign debt. Inflation has a significant and negative effect on foreign debt. The Rupiah Exchange Rate has a significant and positive effect on foreign debt.

Keywords: Tax Revenue, Inflation, Rupiah Exchange Rate and Government Debt

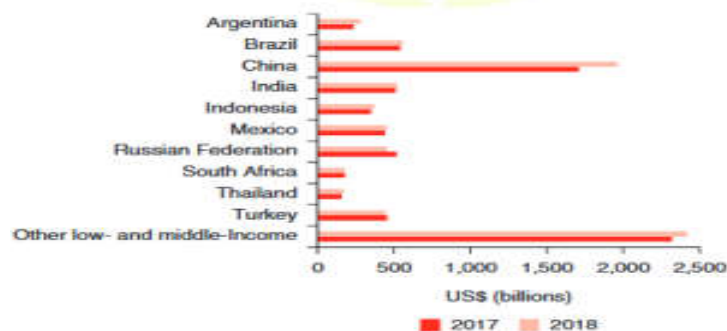
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap utang pemerintah periode tahun 2019-2022. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah populasi dan sampel yang diperoleh dari data laporan keuangan pemerintah APBN, APBD, BPS dan Website mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2022. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis statistik deskriptif, asumsi klasik, uji hipotesis dan uji determinasi. Hasil penelitian ini adalah Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap utang luar negeri. Inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap utang luar negeri. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh signifikan dan positif terhadap utang luar negeri.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Utang Pemerintah.

PENDAHULUAN

Banyak negara berkembang yang pada umumnya memiliki tingkat bantuan pemerintah yang lumayan rendah, pengembangan ekonomi yang berkembang adalah titik fokus perhatian tentang kompensasi waktu yang hilang di bidang keuangan pada negara-negara maju, serta Indonesia. Target peningkatan pembangunan nasional yang tercatat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019 adalah laju pembangunan keuangan sebesar 8% yang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapitanya menyentuh Rp.72.217 (Fahmi, 2021). Pengendalian ekspansi merupakan tujuan definitif dari strategi keuangan yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Bagaimanapun, tidak hanya pengaturan terkait uang, pendekatan moneter juga siap untuk mengendalikan ekspansi. Ekspansi adalah ekspansi biaya yang umum dan stabil dalam jangka panjang. Ekspansi tidak dapat dicirikan sebagai peningkatan biaya dalam beberapa hal kecuali jika kenaikannya jauh atau mengakibatkan peningkatan biaya dalam hal lain. Menurut informasi Statistik Utang Internasional yang didistribusikan oleh Bank Dunia, memperlihatkan bahwasanya tahun 2017 serta 2018 Indonesia termasuk sebagai 10 negara dengan penghasilan bawah hingga menengah yang kewajiban asingnya terbesar ketujuh menurut informasi tersebut (World Bank, 2020).



Sumber : *International Debt Statistics (IDS)* Tahun 2020, World Bank

Gambar 1. Data 10 Besar Negara Berpendapatan Rendah Hingga Menengah Dengan Utang Luar Negeri Tertinggi

Sesuai dengan informasi tersebut, bisa diketahui bahwasanya Indonesia masuk ke 10 negara dengan penghasilan bawah sampai menengah yang kewajiban asingnya paling tinggi. Dalam angka tersebut, di 2017 serta 2018 Indonesia tercantum menjadi negara yang kewajiban asingnya terbesar ketujuh selepas China, Brasil, India, Rusia, Meksiko, serta Turki. Berita lain yang memuat hal tersebut di publish oleh CNBC Indonesia atau dapat dikunjungi pada website resminya yaitu cnbcindonesia.com dimana menyampaikan bahwa Bank Dunia dalam laporannya bertajuk *Second Edition* mengungkapkan, hingga akhir 2020, total nilai Utang Luar Negeri (ULN) dari 120 negara berpendapatan menengah hingga rendah mencapai US\$ 8,4 triliun atau Rp 117.600 triliun (kurs Rp 14.000/US\$). Bank Dunia mencatat, dari total utang

luar negeri tersebut, ada 10 negara dengan jumlah utang terbanyak dan diantaranya ada Indonesia yaitu peringkat ke 7. Nomor satu adalah China yang pinjamannya lebih dari US\$ 2.000 miliar hingga kuartal III-2021. Realisasi utang ini lebih tinggi dari total utang pada akhir 2020 yang sebesar US\$ 8,1 triliun atau Rp 113.400 triliun. Bank Dunia menjelaskan utang luar negeri oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah pada tahun 2020 terjadi dengan latar belakang pandemi Covid-19 yang menyebabkan resesi global. Utang ini bahkan terparah sejak Perang Dunia dan Perang Dunia II atau depresi hebat.

Kenyataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Agustus 2018 melaporkan bahwa utang Indonesia sampai dengan akhir Juli 2018 naik hingga mencapai Rp.4.253,02 triliun atau 29,74% Produk Domestik Bruto (Kementerian Keuangan, 2018). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tabel berikut :

Tabel 1. Posisi utang hingga akhir Juli 2018

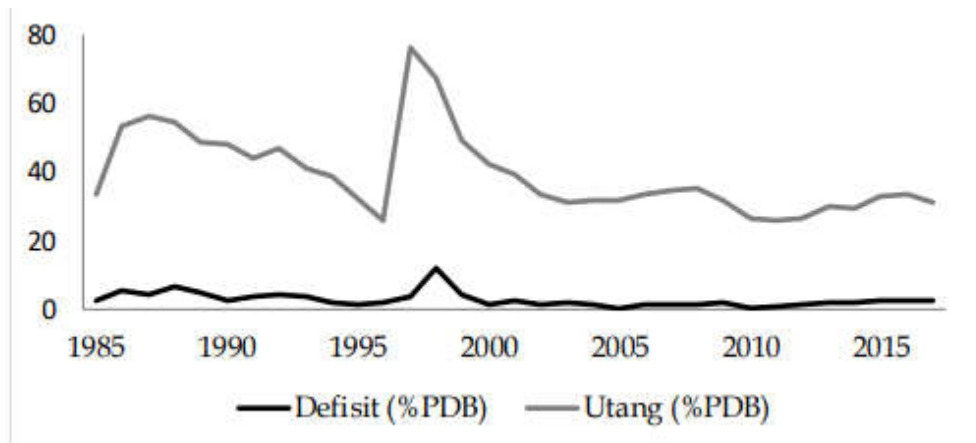
	Nominal (dalam triliun rupiah)	Growth (yoy)	%
Total utang pemerintah pusat	4.253,02	12,51%	100,00%
a. Pinjaman	785,49	6,87%	18,47%
1. Pinjaman luar negeri	779,71	6,87%	18,33%
2. Pinjaman dalam negeri	5,79	48,28%	0,03%
b. Surat berharga negara	3.467,52	16,18%	81,35%
1. Denominasi rupiah	2.442,82	10,73%	57,44%
2. Denominasi valas	1.024,71	22,15%	24,09%
PDB	14.302,21		
Rasio utang terhadap PDB	29,74%		

Sumber: Fahmi (2021)

Berdasarkan tabel 1, pinjaman luar negeri mencapai 18,33% dari total utang sedangkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi valas mencapai 24,09% dari total utang, naik 22,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi valas, pinjaman luar negeri juga nilainya dalam mata uang asing hingga 42,42%, utang pemerintah sangat dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dalam kurun waktu Februari sampai dengan Juli 2018, utang pemerintah pusat menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Pada bulan Februari 2018, total utang pemerintah mencapai Rp. 4.034,8 Triliun lalu meningkat menjadi Rp. 4.253,02 Triliun pada bulan Juli 2018. Meningkatnya *outstanding* utang pemerintah mengakibatkan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang semakin besar. Meskipun secara rasio utang pemerintah masih berada pada batas aman, keadaan ini perlu menjadi perhatian pemerintah supaya kekhawatiran masyarakat, politikus, dan para ahli ekonomi terhadap kemungkinan terjadinya krisis utang tidak menjadi kenyataan. Angka tersebut dinilai cukup besar meskipun masih dalam kategori aman karena berada di bawah rasio yang dibatasi Peraturan Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Dalam UU Keuangan Negara, kewajiban pemerintah sebisa mungkin adalah 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Obligasi pemerintah berasal dari uang muka dalam negeri, kredit asing, dan obligasi Surat Berharga Negara (SBN) yang diberikan oleh otoritas publik baik dalam kategori

rupiah maupun uang asing.

Ketika pemerintah memungut pajak yang lebih rendah dibandingkan pengeluaran pemerintah, anggaran pemerintah menjadi defisit yang kemudian didanai utang. Hal tersebut di buktikan dengan Gambar 1.2 mengenai Defisit anggaran dan utang pemerintah pusat tahun 1985-2017 sebagai berikut :



Sumber: Fahmi (2021)

Gambar 2. Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah Pusat Tahun 1985-2017

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Kementerian Keuangan, 2018), defisit anggaran hingga 31 Oktober 2018 mencapai Rp.298,33 triliun atau sebesar 2,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah masih mengandalkan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan dengan realisasi pembiayaan utang hingga akhir Oktober 2018 mencapai Rp333,72 triliun. Utang pemerintah akan terus bertambah selama pemerintah masih menetapkan kebijakan defisit anggaran. Semakin besar celah defisit, semakin besar pula jumlah pinjaman pemerintah. Pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui utang merupakan hal yang lazim dilakukan suatu negara. Selain defisit anggaran, Widharma, et al (2012) menemukan bahwa penerimaan pajak merupakan variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi utang luar negeri sementara nilai tukar dolar berpengaruh secara langsung terhadap total tingkat utang luar negeri pemerintah Indonesia sebesar 26,3%. Dengan kata lain, utang pemerintah akan meningkat ketika pemerintah melaksanakan kebijakan anggaran defisit. Selaras dengan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani sehubungan dengan keadaan kewajiban otoritas publik Republik Indonesia yang terus berkembang akhir-akhir ini karena rencana belanja negara yang terus mengalami kekurangan yang semakin besar (Sukmana, 2018).

Tingginya kekurangan biaya berpengaruh terhadap kenaikan hutang luar negeri. Berkaitan dengan hal itu, kenaikan harga mengurangi nilai utang nominal dan menimbulkan motif untuk mengurangi nilai utang. Pendapat tersebut diperkuat oleh pengujian yang dilakukan Akitoby, et al (2017) yang merangkum bahwasanya perbandingan hutang pemerintah ke *Gross Domestic Product* (GDP) dipengaruhi tingkat inflasi. Inflasi yang lebih tinggi akan membantu menurunkan tingkat rasio

utang terhadap *Gross Domestic Product* (GDP). Maka sesuai dengan pemaparan tersebut di pengujian ini penulis memilih judul skripsi “Pengaruh Penerimaan Pajak, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Utang Pemerintah Periode Tahun 2019-2022”.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Penerimaan Pajak

Arti penerimaan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Ningsih dkk, (2021) adalah bahwa penerimaan retribusi ialah asal pendapatan yang bisa didapat dengan konsisten sekaligus bisa ditumbuhkan dengan ideal selaras dengan keperluan pemerintah dan keadaan daerah setempat. Pendapatan pungutan akan dibayar oleh otoritas publik yang diperoleh dari para individu. Tidak semata-mata sampai pada definisi singkat tersebut bahwa harta kekayaan yang disimpan dalam penyimpanan negara akan digunakan untuk keperluan pemerintah bagi kesejahteraan warga negara, karena alasan misi negara yang ditetapkan oleh para pendiri terdahulu bangsa ini adalah untuk mengembangkan kemakmuran warga negara sesuai dengan hak-hak sipil (Suherman, 2017).

Inflasi

Menurut Sugiyanto dan Anggun (2020) inflasi merupakan kenaikan harga secara keseluruhan. Sejak lama, pengurangan inflasi merupakan tujuan dari kebijakan pemerintah. Inflasi sendiri ada tiga macam, yaitu *creeping inflation*, *galloping inflation*, dan *hyper inflation*. *Creeping inflation* merupakan inflasi yang sifatnya rendah ataupun ringan berkisar 0-10%. *Galloping inflation* merupakan inflasi yang sifatnya sedang atau diambang batas, bila tidak diatasi akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan inflasi yang paling ditakuti adalah *hyper inflation*, dimana inflasi ini sifatnya sudah tidak dapat dikendalikan karena melambungnya harga-harga dan rendahnya daya beli masyarakat.

Nilai Tukar Rupiah

Sebagaimana ditunjukkan oleh Perlambang (2017) skala konversi rupiah adalah biaya rupiah terhadap bentuk moneter dari berbagai negara. Dengan kata lain, skala konversi rupiah ialah nilai sebuah uang rupiah yang diubah menjadi uang tunai negara lain. Contohnya, standar konversi rupiah ke dolar AS, standar konversi rupiah ke yen, dan lain-lain. Standar konversi ini ialah sebuah petunjuk yang mempengaruhi pergerakan di bursa efek dan pasar mata uang karena para *financial backer* umumnya akan berhati-hati saat ingin berinvestasi. Penurunan skala konversi rupiah terhadap standar moneter asing utamanya Dolar AS, berdampak buruk ke perekonomian beserta pasar modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap utang pemerintah pada tahun 2019-2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis data sekunder dikarenakan hanya memuat analisis laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu data laporan keuangan pemerintah khususnya APBN, APBD, BPS dan situs yang mendukung mulai Januari 2019 sampai April 2022. Pada penelitian ini sampel yang digunakan berjumlah 40 data.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan Pemerintah APBN, APBD, BPS dan *Website* yang mendukung mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2022. Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik, uji parsial, dan uji koefisien determinasi.

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015) Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik (Sugiyono, 2015). Penelitian ini memiliki tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen meliputi penerimaan pajak, inflasi dan nilai tukar rupiah, sedangkan variabel dependen adalah utang pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Analisis statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, deviasi standar, dan modus. Untuk menggambarkan variabel utang pemerintah antara lain penerimaan pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar 0.05. Pengujian normalitas menggunakan SPSS dapat diperoleh dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.12545073
Most Extreme Differences	Absolute	0.134
	Positive	0.088
	Negative	-0.139
Test Statistic		0.139
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.198 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh temuan bahwa model regresi mempunyai residual yang berdistribusi normal, hal tersebut dikarenakan penghitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal terlihat dari standar deviasi yang menggambarkan jarak atau selisih umum antara *mean* dengan data lain yang diobservasi yang dibuktikan dengan koefisien sig = 0.198 > 0.05.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 2 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.639	4.676		2.061	0.049
	Penerimaan Pajak	0.957	0.369	0.314	2.595	0.015
	Inflasi	-0.22	0.920	-0.002	-0.017	0.896
	Nilai Tukar	0.577	0.290	0.245	1.988	0.57

a. Dependen Variabel: Utang Pemerintah

Sumber: Diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 2 hasil pengujian parsial diperoleh temuan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap utang pemerintah dengan nilai

koefisien sig = 0.015 > 0.05. Inflasi berpengaruh negatif terhadap utang pemerintah dengan nilai koefisien sig = 0.896 > 0.05. Nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap utang pemerintah dengan nilai koefisien sig = 0.57 > 0.05.

Uji Determinasi

Tabel 3 Hasil Uji Determinasi (Uji R)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.691 ^a	0.450	0.389	0.13192956574
a. Predictors: (Constant), Nilai Tukar, Penerimaan Pajak, Inflasi				
b. Dependen Variabel: Utang Pemerintah				

Sumber: Diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 3 hasil perhitungan uji determinasi (Uji R), diperoleh temuan penelitian bahwa penerimaan pajak, inflasi, nilai tukar memberikan sumbangsih pengaruh terhadap utang luar negeri sebesar 38,9%, yang dibuktikan dengan koefisien Adjusted R Square = 0,389. Penggunaan Adjusted R Square disebut juga sebagai koefisien determinasi dikarenakan peneliti ingin melihat seberapa jauh data dependen dapat dipengaruhi oleh data independen.

SIMBA

**SEMINAR INOVASI
MANAJEMEN BISNIS DAN
AKUNTANSI 4**

SIMBA

**SEMINAR INOVASI
MANAJEMEN BISNIS DAN
AKUNTANSI 4**

SIMBA

**SEMINAR INOVASI
MANAJEMEN BISNIS DAN
AKUNTANSI 4**

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Utang Pemerintah

Dari hasil tabel 2 hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien sig = $0.015 > 0.05$, dengan nilai t tabel 2.595 yang artinya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel penerimaan pajak terhadap variabel utang pemerintah. Sehingga hipotesis (H1) yang menyatakan penerimaan pajak berpengaruh terhadap utang pemerintah diterima. Berdasarkan teori dasar penerimaan pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap utang negara karena kebijakan pemerintah untuk menetapkan ekspansif fiskal dimana belanja negara selalu lebih besar dari penerimaan pajak. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi, pemerintah berani menambah utang karena optimis terhadap kemampuan membayar utang dari setiap penerimaan pajak.

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Utang Pemerintah

Dari hasil tabel 2 hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien sig = $0.896 > 0.05$, dengan nilai t tabel -0.017, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari variabel inflasi terhadap variabel utang pemerintah. Sehingga hipotesis (H2) yang menyatakan inflasi berpengaruh terhadap utang pemerintah di terima. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah Indonesia. Ketika inflasi di dalam negeri tinggi dan tak terkendali menandakan perekonomian tidak baik yang dapat menurunkan kepercayaan dari negara-negara debitur karena mempertimbangkan kemampuan pengembalian utang. Hal ini disebabkan besarnya risiko negara penerima (Indonesia) tidak dapat melunasi utang termasuk bunga dan pokok pinjaman. Dengan demikian, saat tingkat inflasi naik maka jumlah utang luar negeri yang terserap akan menurun atau berkurang dan begitu sebaliknya.

3. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Utang Pemerintah

Dari hasil tabel 2 hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien sig = $0.57 > 0.05$, dengan nilai t tabel 1.988 yang artinya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel nilai tukar terhadap variabel utang pemerintah. Sehingga hipotesis (H3) yang menyatakan nilai tukar berpengaruh terhadap utang pemerintah di terima. Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Kementerian Keuangan menyatakan bahwa depresiasi atau melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya US dollar maka akan menyebabkan

utang luar negeri Indonesia membesar karena utang luar negeri yang diambil pemerintah yaitu berbentuk valuta asing sesuai kesepakatan negara atau lembaga pemberi pinjaman. Jika terjadi gejolak terdepresiasi nilai tukar rupiah akan menyebabkan penambahan utang luar negeri, karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, serta akan menyebabkan penambahan beban utang luar negeri, karena pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan mata uang negara peminjam (mata uang asing). Pengembalian utang luar negeri biasanya menggunakan valuta asing, dapat dikatakan terdepresiasinya nilai tukar akan menyebabkan naiknya utang luar negeri pemerintah Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap utang luar negeri. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi, pemerintah berani menambah utang karena optimis terhadap kemampuan membayar utang dari setiap penerimaan pajak. Inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap utang luar negeri. Ketika inflasi di dalam negeri tinggi dan tak terkendali menandakan perekonomian tidak baik yang dapat menurunkan kepercayaan dari negara-negara debitur karena mempertimbangkan kemampuan pengembalian utang. Hal ini dikarenakan besarnya risiko negara penerima (Indonesia) tidak dapat melunasi utang termasuk bunga dan pokok pinjaman. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri, atau dengan kata lain ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar naik, Indonesia akan membayar utang luar negerinya dalam mata uang asing, yang akan meningkatkan utang luar negeri. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti untuk mengembangkan penelitiannya dengan mempertimbangkan variabel lain diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabachib, H. M., & Witjaksono, A. A. (2011). Analisis Pengaruh Fundamental Makro dan Indeks Harga Global terhadap IHSG. *Karisma*, 5(2), 63–72
- Cherif, R., & Hasanov, F. (2018). Public debt dynamics: the effects of austerity, inflation, and growth shocks. *Empirical Economics*, 54(3), 1087–1105.
- Divianto. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi , Tingkat Suku Bunga SBI , Dan Nilai Kurs Dollar AS (USD) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, 3(2), 165–197.
- Harsono, A. R., & Worokinasih, S. (2018). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 60(2), 102–110.
- Kalengkongan, N. C., & Rate, P. Van. (2016). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia (IHSG) Dan Jepang (Nikkei 225) Periode 2011 - 2015. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 321–333.

Kewal, S. S. (2012). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Dan Pertumbuhan Pdb Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Jurnal Economia*, 8(1), 53–64. <https://doi.org/10.21831/economia.v8i1.801>

Kewal, S. S. (2012). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Dan Pertumbuhan Pdb Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Jurnal Economia*, 8(1), 53–64. <https://doi.org/10.21831/economia.v8i1.801>

Machmud, S., & Wijanarko, B. A. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar USD/Rupiah, Dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 7(1), 30–40. Diambil dari <http://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/jebe/article/view/27>

Ningsih, N., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2021). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Depok Cimanggis) Periode 2015-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 7(1).

Perlambang, H. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi. *Media Ekonomi*, 18(2), 49-68.

Ratag, Kalangi, & Mandej, E. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Defisit Anggaran, Dan Tingkat Kurs Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia (Periode Tahun 1996-2016). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 69–78.

S

MAJEMEN BISNIS DAN
AKUNTANSI 4

Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun
Agustus 2022
E-ISSN 2686-1771